

**ANALISIS KAPASITAS INSTITUSIONAL SEKOLAH DASAR INKLUSIF DI
KAWASAN PERI-URBAN: STUDI MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA
SAMARINDA**

Vina Karmilasari^{1*}, Meiliyana², Ita Prihantika³

^{1,2,3} Universitas Lampung

Email Korespondensi: vina.karmilasari@fisip.unila.ac.id*

Email: meiliyana@fisip.unila.ac.id; ita.prihantika@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the institutional capacity of inclusive elementary schools in the peri-urban areas of Samarinda City from the perspective of public service management. The research is driven by the persistent inequality in the quality and accessibility of inclusive education services in peri-urban regions, particularly in the districts of North Samarinda and Loa Janan Ilir. A qualitative approach was used with case studies in three inclusive elementary schools. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis, and were processed using the Miles & Huberman interactive model. The findings reveal that institutional capacity remains limited, characterized by inadequate teacher competencies, weak internal school management, and the absence of systemic external partnerships. The underdeveloped relational capacity has hindered the implementation of whole-of-government and whole-of-community approaches, which are essential for inclusive governance. This study recommends strengthening school institutions through teacher training, inclusive-based planning, and collaborative governance via network-based strategies. The results contribute to the development of a more equitable, responsive, and sustainable public education system for children with special needs in peri-urban areas.

Keywords: Inclusive schools, institutional capacity, public service management, peri-urban.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas institusional sekolah dasar inklusif di kawasan peri-urban Kota Samarinda dalam perspektif manajemen pelayanan publik. Studi ini dilatarbelakangi oleh masih minimnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif di wilayah pinggiran kota, khususnya di Kecamatan Samarinda Utara dan Loa Janan Ilir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada tiga sekolah dasar inklusif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, lalu dianalisis menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas institusional sekolah masih rendah, ditandai dengan terbatasnya kapasitas teknis guru, lemahnya manajemen internal sekolah, serta kurangnya kemitraan eksternal yang sistemik. Dimensi kapasitas relasional yang belum berkembang menghambat pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-community*, yang seharusnya menjadi dasar tata kelola inklusif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan sekolah melalui peningkatan kompetensi guru, perencanaan berbasis inklusi, serta pengembangan tata kelola kolaboratif berbasis governance jaringan. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam upaya mendorong pelayanan pendidikan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan bagi anak berkebutuhan khusus di wilayah peri-urban.

Kata kunci: Sekolah inklusif, kapasitas institusional, manajemen pelayanan publik, peri-urban.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Prinsip dasar dari pendidikan inklusif adalah bahwa setiap anak, tanpa memandang keadaan mental maupun fisiknya, memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya (Alhaddad, 2020). Sebagai bagian dari komitmen global terhadap pendidikan yang adil dan merata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dengan tegas menekankan pentingnya penerapan pendidikan inklusif di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif masih cukup besar dan kompleks, terutama di wilayah peri-urban seperti Kota Samarinda yang mengalami pertumbuhan pesat dan perkembangan yang dinamis.

Kota Samarinda, yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki karakteristik unik dengan kawasan peri-urban yang terus berkembang, termasuk Kecamatan Samarinda Utara dan Loa Janan Iilir. Wilayah ini merupakan bagian dari kawasan yang mengalami transisi cepat antara kehidupan perkotaan dan pedesaan, sehingga menghadirkan berbagai tantangan dalam hal penyediaan layanan publik, termasuk pendidikan. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda pada tahun 2023, Kecamatan Samarinda Utara memiliki populasi lebih dari 120.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,5% per tahun, angka yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kota. Pertumbuhan ini tentunya berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk sekolah dasar yang mampu memenuhi kebutuhan layanan pendidikan inklusif bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Namun, meskipun ada peningkatan kebutuhan, kapasitas pelayanan pendidikan di kawasan ini masih belum optimal. Data dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 15% dari total sekolah dasar yang menerapkan model pendidikan inklusif di sekolah mereka. Selain itu, hasil pemantauan dari mencatat bahwa banyak sekolah yang belum memiliki guru terlatih dalam pendidikan inklusif, serta fasilitas yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan pendidikan inklusif yang telah ditetapkan dan realitas yang ada di lapangan, di mana implementasi pendidikan inklusif sering kali terhambat oleh kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung.

Dalam konteks manajemen pelayanan publik, tantangan ini mencerminkan perlunya analisis mendalam terhadap kapasitas institusional sekolah dasar inklusif di kawasan peri-urban. Kesenjangan dalam kapasitas ini dapat menghambat akses pendidikan yang setara bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas institusional sekolah dasar inklusif di kawasan peri-urban Kota Samarinda, dengan fokus utama pada aspek manajemen pelayanan publik yang mendukung pendidikan inklusif yang efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini meliputi manajemen pelayanan publik dalam penyelenggaraan sekolah dasar inklusif; serta kapasitas institusional dalam penyelenggaraan sekolah dasar inklusif. Penelitian di lakukan pada dua sekolah dasar inklusif di Kecamatan Samarinda Utara dan satu sekolah dasar di Kecamatan Loa Janan Iilir. Lokasi penelitian dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan keberadaan sekolah dasar yang telah menerapkan model inklusi dan berada dalam wilayah peri-urban. Informan utama dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua siswa, serta pejabat dinas pendidikan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pendidikan inklusif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika yang terjadi di lapangan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen kebijakan sekolah. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif. Observasi langsung dilakukan dengan tujuan untuk menilai kondisi fisik sekolah dan fasilitas yang tersedia bagi ABK. Selain itu, studi dokumen kebijakan sekolah juga dilakukan untuk menganalisis kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif dan untuk mengevaluasi implementasinya. Proses ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan pendidikan inklusif di kawasan ini. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles & Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Karmilasari, Utami, & Agustino, 2023). Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait kapasitas institusional sekolah dasar inklusif dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keadaan pendidikan inklusif di kawasan peri-urban Kota Samarinda, yang dapat menjadi dasar bagi upaya perbaikan ke depan.

PEMBAHASAN

Manajemen Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar Inklusif di Kawasan Peri-Urban

Meningkatnya jumlah Sekolah Dasar Negeri inklusif tidak menjamin meningkatnya kualitas pendidikan yang diberikan (Muzdalifah & Billah, 2017), sebab dalam penerapan pendidikan inklusif dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Di kawasan peri-urban Kota Samarinda penyelenggaraan sekolah dasar inklusif ini belum sepenuhnya terimplementasi dengan optimal. Pelayanan pendidikan masih cenderung bersifat administratif dan berbasis standar umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik anak berkebutuhan khusus (ABK). Padahal ABK adalah anak yang memerlukan pelayanan khusus dan spesifik dalam pendidikan dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan-hambatan yang dimiliki (Sukadari, 2020).

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi (UPTD PLDPI) Kota Samarinda sebagai lembaga yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Samarinda memiliki peran menyediakan layanan dan dukungan kepada penyandang disabilitas, khususnya di bidang pendidikan. Peran ini tergambar pada salah satu misinya yakni meningkatkan mutu pendidikan di Kota Samarinda. Misi tersebut tercermin dalam salah satu kegiatan PLDPI yakni PLDPI *Goes to school*. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dengan orang tua dan *skrining* terhadap siswa yang terindikasi memiliki kebutuhan khusus (ABK). Dalam konteks pembahasan di atas kegiatan *Goes to school* tersebut secara administratif telah memenuhi kebutuhan bentuk upaya meningkatkan mutu pendidikan inklusif, namun secara kuantitas jika dibandingkan dengan jumlah sekolah inklusif yang ada di Kota Samarinda kegiatan tersebut baru mampu menjangkau sebagian kecilnya saja.

Gambar 1: Kegiatan PLDPI Goes to School



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2024

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



Hal lain yang peneliti temukan adalah sekolah-sekolah yang diteliti belum menyediakan sistem umpan balik bagi orang tua ABK atau platform partisipasi dalam perencanaan layanan. Padahal, prinsip responsivitas sangat penting dalam menjamin keadilan akses terhadap layanan pendidikan (Osborne, 2006); (Andrikopoulos & Ifanti, 2020).

Ketimpangan akses pendidikan inklusif ini diperparah dengan kondisi wilayah peri-urban yang sering kali berada di luar prioritas pembangunan infrastruktur pendidikan. Menurut (ADB, 2019) wilayah peri-urban di banyak kota berkembang menghadapi “kelemahan tata kelola” (*governance gap*), yakni pertumbuhan wilayah tidak diikuti oleh sistem pelayanan yang adaptif dan inklusif.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya reformasi manajemen layanan publik pendidikan dengan mengintegrasikan *citizen-centered governance*. Artinya, pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat lokal (Karmilasari, Utami, & Puspawati, 2023), termasuk kelompok disabilitas. Sebagaimana disarankan oleh (Bovaird & Loeffler, 2012) kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor non-negara dapat menghasilkan inovasi pelayanan publik yang lebih berkelanjutan.

Kapasitas Institusional dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar Inklusif

Kapasitas institusional merujuk pada kemampuan suatu institusi untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien. Kapasitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, struktur organisasi, hingga budaya institusi itu sendiri. Grindle (1997) mengelompokkan kapasitas institusional menjadi tiga dimensi penting yang saling berkaitan: kapasitas teknis, kapasitas manajerial, dan kapasitas relasional. Ketiganya sangat relevan untuk menilai kesiapan institusi pendidikan dasar di Kecamatan Samarinda utara dan Loa Janan dalam menerapkan pendidikan inklusif.

1. Kapasitas Teknis

Kapasitas teknis mengacu pada kecakapan individu dalam organisasi dalam menjalankan tugas secara profesional. Dalam konteks pendidikan inklusif, hal ini merujuk pada keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan siswa ABK. UPTD PLDPI Kota Samarinda memiliki peran memberi layanan dan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Samarinda. Gambar berikut menunjukkan aktivitas layanan pendidikan inklusif yang dilakukan berupa Sosialisasi Pendidikan Inklusif yang ditujukan pada guru-guru sekolah dasar inklusif di kecamatan Samarinda Utara.

Gambar 2: Sosialisasi Pendidikan Inklusif di Kecamatan Samarinda Utara



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2024

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan guru terkait pendidikan inklusif. Namun, informasi lain yang juga peneliti peroleh bahwa sebagian besar guru di wilayah peri-urban Samarinda belum mendapatkan pelatihan formal terkait pendidikan inklusif. Data dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda (2023) menunjukkan bahwa hanya sekitar 18% guru SD di kawasan Samarinda Utara dan Loa Janan Ilir yang pernah mengikuti pelatihan inklusi. Kondisi ini mencerminkan hanya sebagian kecil guru yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan pendidikan inklusif.

Kompetensi guru dalam pendidikan inklusif sangat bergantung pada pelatihan teknis namun kondisi yang terjadi saat ini upaya pelatihan yang dilakukan masih belum merata dan sistematis (Juhri, 2023). Kurangnya pelatihan atau pembekalan dalam bidang pendidikan inklusif bagi guru-guru reguler menyebabkan mereka tidak memiliki pendekatan pedagogis yang sesuai. Akibatnya banyak guru merasa tidak percaya diri atau kebingungan dalam menyusun rencana pembelajaran yang adaptif (Wafiqni et al., 2023). Lebih jauh kondisi guru yang belum memiliki kompetensi ini berdampak pada keterampilan dalam menyusun kurikulum individual (*individualized education plan/IEP*), atau menggunakan metode pembelajaran yang fleksibel dan diferensiatif. Wawancara yang dilakukan pada guru inklusif di salah satu sekolah di Kecamatan Samarinda Utara diketahui bahwa materi ajar belum disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus, sehingga partisipasi dan pemahaman siswa terganggu. Penelitian oleh (Florian & Black-Hawkins, 2011) menekankan bahwa kapasitas teknis guru dalam menyusun strategi pembelajaran diferensial sangat krusial dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Tanpa peningkatan kapasitas ini, kebijakan sekolah inklusif hanya akan menjadi label administratif tanpa perubahan praktik nyata.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 memberikan mandat normatif bahwa Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Pendidik dan tenaga kependidikan yang dimaksud tersebut dapat berupa guru pendamping khusus (GPK). Di Kecamatan Loa Janan Ilir rasio antara jumlah siswa berkebutuhan khusus dengan GPK sangat tidak seimbang, bahkan satu GPK harus menangani beberapa anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam merancang pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus, guru dituntut untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam metode pengajarannya. Guru Pembimbing Khusus (GPK) perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik serta jenis disabilitas yang dimiliki oleh siswa. Proses ini dilakukan melalui kolaborasi antara GPK dan guru kelas untuk merancang serta mengimplementasikan program layanan khusus yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) (Putri & Hamdan, 2021)

2. Kapasitas Manajerial

Kapasitas manajerial merujuk pada kemampuan sekolah dalam merancang program, mengelola sumber daya, dan menetapkan prioritas kebijakan internal. Sayangnya, banyak sekolah inklusif di Samarinda belum memiliki *blueprint* atau rencana kerja khusus pendidikan inklusif. Tidak ditemukan dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang memuat strategi penyelenggaraan layanan bagi ABK dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang belum memprioritaskan alokasi program khusus untuk ABK secara eksplisit menunjukkan bahwa program perencanaan pendidikan inklusif masih sangat lemah. Salah satu hal yang mendasari kondisi ini adalah kepala sekolah belum memahami konsep pendidikan inklusif secara utuh, sehingga tidak ada prioritas terhadap kebutuhan siswa ABK (Kriswanto et al., 2023); (Kurniawan et al., 2024). Penelitian oleh (Juhri, 2023) menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas manajerial sekolah inklusif disebabkan oleh minimnya dukungan kebijakan operasional dari dinas pendidikan. Sekolah sering kali tidak diberi panduan teknis yang memadai dalam merancang program inklusif, sehingga kebijakan nasional tidak dapat ditransformasikan ke dalam perencanaan sekolah.

Tanpa perencanaan strategis berbasis data dan kebutuhan lokal, institusi pendidikan akan kesulitan mengalokasikan anggaran, menentukan pelatihan yang dibutuhkan guru, atau membangun kemitraan yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

mendukung. Dalam konteks pelayanan publik, lemahnya perencanaan ini mencerminkan keterbatasan dalam fungsi *governance* di tingkat satuan pendidikan (Hill & Hupe, 2002). Menyadari kondisi ini pada tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Samarinda melakukan upaya perbaikan secara terstruktur dengan diawali *Forum Group Discussion* FGD Penyusunan Roadmap Pembangunan Inklusi di Samarinda. Penyusunan Roadmap Pembangunan Inklusif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman baru terkait pembangunan inklusi yang ideal di Kota Samarinda serta aspek-aspek pendidikan inklusif yang menjadi prioritas untuk ditindak lanjuti berupa; kebijakan yang mendukung pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas sarana prasarana umum, dan pendidikan inklusi.

Kapasitas manajerial sekolah inklusif merujuk pada kemampuan institusi pendidikan dalam merancang program, mengelola sumber daya, dan menetapkan prioritas kebijakan internal yang berpihak pada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di kawasan peri-urban Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Samarinda Utara dan Loa Janan Iir, masih menghadapi keterbatasan yang signifikan dalam aspek manajerial.

Sekolah-sekolah di dua kecamatan tersebut belum memiliki dokumen perencanaan strategis yang secara khusus memuat agenda pendidikan inklusif. Tidak ditemukan adanya Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang mencantumkan strategi layanan bagi ABK, maupun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memprioritaskan alokasi untuk program inklusi. Hal ini menunjukkan bahwa program perencanaan inklusif belum menjadi arus utama dalam tata kelola sekolah, terutama di wilayah yang secara geografis dan sosial tergolong pinggiran kota (peri-urban).

Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh ketidaksiapan kepala sekolah dalam memahami konsep pendidikan inklusif secara utuh, sehingga kebutuhan siswa ABK belum menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan sekolah (Kriswanto et al., 2023). Selain itu, lemahnya dukungan kebijakan operasional dari dinas pendidikan, seperti tidak tersedianya panduan teknis atau pendampingan khusus, turut memperburuk situasi. Akibatnya, kebijakan nasional tentang pendidikan inklusif sulit untuk diimplementasikan secara konkret di tingkat satuan pendidikan.

Dalam perspektif pelayanan publik, ketiadaan perencanaan strategis berbasis data dan kebutuhan lokal—yang sangat penting di wilayah peri-urban dengan karakter sosial yang majemuk dan dinamika urbanisasi yang tinggi—berimplikasi pada lemahnya kemampuan sekolah dalam menyusun program yang responsif. Sekolah menjadi kesulitan dalam mengalokasikan anggaran, menentukan kebutuhan pelatihan guru, atau menjalin kemitraan lintas sektor. Hal ini menunjukkan keterbatasan fungsi *governance* pada tingkat satuan pendidikan (Hill & Hupe, 2002).

Menyadari urgensi perbaikan tata kelola tersebut, pada tahun 2024 Dinas Pendidikan Kota Samarinda mulai melakukan intervensi kebijakan melalui penyelenggaraan *Forum Group Discussion* (FGD) untuk Penyusunan *Roadmap* Pembangunan Inklusi. *Roadmap* ini disusun sebagai langkah awal untuk membangun pemahaman bersama tentang pendidikan inklusif yang ideal, serta mengidentifikasi aspek-aspek prioritas yang perlu ditindaklanjuti, seperti kebijakan layanan bagi penyandang disabilitas, peningkatan aksesibilitas sarana prasarana, dan penguatan kelembagaan sekolah inklusif.

Gambar 3: FGD Penyusunan Roadmap Pembangunan Inklusi di Samarinda



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Samarinda, 2024

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



Masalah-masalah yang ditemukan di Samarinda Utara dan Loa Janan Ilir tersebut menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan dan kebijakan dari pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas manajerial sekolah inklusif. Diperlukan pelatihan manajemen berbasis inklusi bagi kepala sekolah dan tenaga kependidikan, serta pengembangan indikator kinerja manajerial yang mengintegrasikan prinsip-prinsip inklusi sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja sekolah.

3. Kapasitas Relasional

Dimensi ini mencakup kemampuan institusi untuk membangun jaringan kerja dan kemitraan eksternal. Kapasitas relasional yang baik memungkinkan sekolah menjalin kerja sama dengan dinas pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memperkuat pelayanan.

Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas relasional sekolah inklusif di kawasan peri-urban Samarinda masih bersifat sporadis dan belum terbangun secara sistemik. Meskipun terdapat sejumlah inisiatif kemitraan, seperti pendampingan dari komunitas lokal atau LSM, kolaborasi tersebut umumnya bersifat ad hoc dan tidak terintegrasi dalam mekanisme formal yang menjamin keberlanjutan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kusumastuti & Rukmini (2021) yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor dalam pendidikan inklusif di daerah pinggiran sering kali bersifat insidental dan tidak didukung oleh kebijakan yang bersifat mengikat dan struktural.

Salah satu indikasi lemahnya kapasitas relasional ini tampak dari hubungan yang belum optimal antara sekolah dan orang tua siswa berkebutuhan khusus (ABK). Sekolah belum menjalin komunikasi yang intensif, terbuka, dan partisipatif dengan orang tua, sehingga mereka tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana pembelajaran individual (IEP) maupun kegiatan sekolah secara umum. Kurangnya edukasi dan pemberdayaan juga menyebabkan sebagian orang tua menjadi apatis atau sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak kepada sekolah.

Selain itu, kemitraan sekolah dengan lembaga-lembaga pendukung eksternal juga masih minim. Kerja sama dengan institusi seperti Dinas Sosial, Puskesmas, lembaga psikologi atau terapi, serta organisasi penyandang disabilitas (OPD) belum terbangun secara sistematis. Kondisi ini berdampak pada tidak komprehensifnya intervensi terhadap kebutuhan siswa ABK, karena sekolah tidak mendapatkan dukungan teknis maupun sumber daya tambahan dari pihak eksternal.

Di sisi lain, kolaborasi antarsekolah pun belum terfasilitasi dengan baik. Forum diskusi atau jejaring kerja sama antar sekolah inklusif dan sekolah reguler untuk saling berbagi praktik baik *best practices* atau merumuskan solusi kolektif masih jarang dijumpai. Kepala sekolah dan guru cenderung bekerja dalam isolasi, tanpa adanya dialog produktif dengan rekan sejawat dari lembaga pendidikan lainnya.

Masalah relasional juga muncul dari lingkungan sosial sekolah. Stigma dan penolakan sosial terhadap siswa berkebutuhan khusus masih tinggi. Kurangnya literasi publik mengenai konsep inklusi menyebabkan masyarakat sekitar belum sepenuhnya menerima kehadiran anak-anak ABK di sekolah umum. Sekolah pun belum secara proaktif menjalankan program kampanye atau edukasi inklusi bagi komunitas sekitarnya.

Lemahnya koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi tantangan lainnya. Belum ada sistem pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan dari dinas pendidikan, baik dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan, teknis pembelajaran, maupun pengelolaan sumber daya manusia yang inklusif.

Terakhir, kurangnya ruang dialog partisipatif di lingkungan internal sekolah turut menghambat penguatan kapasitas relasional. Guru reguler, guru pendamping khusus (GPK), serta tenaga kependidikan lainnya belum dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait strategi dan kebijakan inklusi. Relasi antar unsur di dalam sekolah masih cenderung bersifat hierarkis, bukan kolaboratif.

Rendahnya kapasitas relasional sekolah inklusif di kawasan peri-urban Samarinda sebagaimana diuraikan sebelumnya, secara langsung menghambat implementasi pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-community*, yang justru sangat krusial dalam penyediaan layanan inklusif. Pendekatan *whole-of-government* menekankan pentingnya integrasi dan sinergi lintas instansi dalam mendukung layanan publik yang kompleks, seperti pendidikan inklusif. Namun, ketiadaan mekanisme koordinasi yang formal dan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

berkelanjutan antara sekolah, dinas pendidikan, dinas sosial, layanan kesehatan, dan lembaga lainnya mencerminkan belum terbangunnya logika kerja terpadu antarinstansi pemerintahan.

Sementara itu, pendekatan *whole-of-community* menuntut partisipasi aktif dari komunitas dalam mendukung proses pendidikan inklusif, baik dalam bentuk dukungan sosial, advokasi, maupun keterlibatan dalam proses pembelajaran. Sayangnya, resistensi masyarakat dan rendahnya literasi publik tentang inklusi menunjukkan bahwa pendekatan ini belum terwujud secara optimal di tingkat lokal.

Untuk itu, diperlukan penguatan mekanisme kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sekolah, keluarga, masyarakat, organisasi disabilitas, hingga pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pendekatan *governance* jaringan *network governance* menjadi relevan sebagai strategi tata kelola pendidikan inklusif yang adaptif dan partisipatif. *Governance* jaringan menekankan pentingnya komunikasi dua arah, pembagian peran secara fleksibel, serta kepercayaan dan komitmen jangka panjang antaraktor yang terlibat. Dengan memperkuat jejaring ini, sekolah tidak lagi bekerja secara terisolasi, tetapi menjadi simpul dari sistem sosial yang lebih besar dan mendukung.

Lebih dari sekadar teknis pembelajaran, pendidikan inklusif pada hakikatnya merupakan upaya membangun relasi sosial dan kelembagaan yang inklusif. Hal ini mencakup bagaimana sekolah memosisikan dirinya sebagai ruang sosial yang terbuka, mendengarkan kebutuhan semua pihak, serta mampu mengintegrasikan keberagaman sebagai bagian dari kultur institusionalnya. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada tersedianya guru pendamping khusus (GPK) atau kurikulum adaptif, melainkan pada kematangan kapasitas relasional antarpihak yang bekerja bersama dalam ekosistem inklusi khususnya di kawasan peri-urban.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas institusional sekolah dasar inklusif di kawasan peri-urban Kota Samarinda, khususnya di Kecamatan Samarinda Utara dan Loa Janan Ilir, masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif yang efektif. Ketimpangan ini terlihat pada tiga dimensi utama: kapasitas teknis, kapasitas manajerial, dan kapasitas relasional. Secara teknis, sebagian besar guru belum memiliki pelatihan formal dan kompetensi khusus dalam pendidikan inklusif, sehingga kurang siap dalam merancang pembelajaran yang adaptif. Dari sisi manajerial, perencanaan sekolah belum mengintegrasikan kebutuhan ABK secara eksplisit ke dalam RKS maupun RKAS, yang menunjukkan rendahnya kesadaran dan komitmen kelembagaan terhadap prinsip inklusi. Sementara itu, kapasitas relasional juga tergolong lemah; sekolah belum mampu membangun kemitraan strategis dengan masyarakat, lembaga pendukung, maupun pemangku kepentingan lintas sektor secara sistemik.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di kawasan peri-urban masih bersifat administratif dan insidental, belum berbasis sistem tata kelola kolaboratif. Lemahnya kapasitas relasional juga menjadi penghambat utama dalam penerapan pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-community*, yang seharusnya menjadi kerangka ideal dalam penguatan layanan inklusif di tingkat lokal. Dengan demikian dibutuhkan langkah penguatan kapasitas institusional sekolah secara menyeluruh, mulai dari pelatihan guru, penguatan perencanaan strategis yang inklusif, hingga pembangunan mekanisme kemitraan melalui pendekatan *governance* jaringan. Dengan demikian, sekolah dapat berperan sebagai simpul aktif dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang setara dan berkeadilan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

REFERENSI

- ADB. (2019). *Fostering Growth and Inclusion in Asia's Peri-Urban Areas*. Asian Development Bank.
Alhaddad, M. R. (2020). Konsep Pendidikan Multikulturalan Dan Pendidikan Inklusif. *Raudhah Proud to Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 5(1), 21–30.
<https://doi.org/10.48094/raudhah.v5i1.57>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 3 Maret 2025

- Andrikopoulos, V., & Ifanti, A. A. (2020). New Public Management and Governance: Quo Vadis? *Journal of Public Administration and Governance*, 10(3), 430. <https://doi.org/10.5296/jpag.v10i3.17494>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda. (2023). *Kota Samarinda Dalam Angka 2023*.
- Bovaird, T., & Loeffler, E. (2012). From Engagement to Co-production: The Contribution of Users and Communities to Outcomes and Public Value. *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 23(4), 1119–1138. <https://doi.org/10.1007/s11266-012-9309-6>
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). The New Public Service: Serving Rather Than Steering. In *Public Administration Review*. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Dinas Pendidikan Kota Samarinda. (2024). *Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif*. Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- Florian, L., & Black-Hawkins, K. (2011). Exploring Inclusive Pedagogy. *British Educational Research Journal*, 37(5), 813–828. <https://www.jstor.org/stable/23077052>
- Grindle. (1997). *Getting Good Governance: Capacity Building in The Public Sector of Developing Countries* (S. Marilee, Ed.). Harvard Institute for International Development.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. SAGE Publications.
- Juhri. (2023). Evaluasi Program Pendidikan Inklusif Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 2(4), 425–431, 2(4), 425–431.
- Karmilasari, V., Utami, A., & Agustino, M. F. (2023). *Dynamic Governance: Educational Transformation Through the Merdeka Belajar Policy “Sekolah Penggerak” in Lampung Province* (pp. 792–804). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_76
- Karmilasari, V., Utami, A., & Puspawati, A. A. (2023). Analyzing the impact of education policy on the quality of education in disadvantaged areas in Bongan sub-district, Kutai Barat district. *Journal of Research in Social Science and Humanities*, 3(2), 71–75. <https://doi.org/10.47679/jrssh.v3i2.195>
- Kinanthi, T. K., Wardani, D. K., Sarie, A. C., & Marini, A. (2024). *Meningkatkan Efektivitas Manajemen Sekolah Dalam Penerapan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar*. 1(3), 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.532>
- Kriswanto, D., Suyatno, S., & Sukirman, S. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar: Analisis Faktor-Faktor dan Solusi yang Ditawarkan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3081–3090. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i5.6167>
- Kurniawan, A., Satya, G., Badan, N., Keuangan, P., Aset, D., Provinsi, D., & Tengah, J. (2024). Akuntabilitas dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekolah: Studi Kasus Sekolah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Jawa Tengah. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.56015/gjiklp.v10i4.255>
- Mandasari, Z. (2022). Implementasi Pendekatan Citizen’s Charter Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pada Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarbaru. *Bappenas Working Papers*, 5(3), 394–406. <https://doi.org/10.47266/bwp.v5i3.188>
- Muzdalifah, F., & Billah, H. (2017). Pengaruh Efikasi Pada Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusif. *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 6(1), 26–34. <https://doi.org/10.21009/jppp.061.04>
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance? *Public Management Review*, 8(3), 377–387. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif*. (2022).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009*. (n.d.).
- Putri, Y., & Hamdan, S. R. (2021). Sikap Dan Kompetensi Guru Pada Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar. *Jpi (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 138. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v4n2.p138-152>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

286

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 3 Maret 2025

Sukadari, S. (2020). Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui Pendidikan Inklusi. *Elementary School Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Ke-Sd-An*, 7(2).

<https://doi.org/10.31316/esjurnal.v7i2.829>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (n.d.).

Wafiqni, N., Rahmaniah, N., & Supena, A. (2023). Strategi Pembelajaran Untuk Anak Berkesulitan Belajar Di Sekolah Inklusif. *Primary Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar*, 15(1), 95–112.

<https://doi.org/10.32678/primary.v15i1.7800>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:

